



ANALISIS SEKTOR UNGGULAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI KE PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA DI KOTA PEKALONGAN

Sutoto

Bappeda Kota Pekalongan

Email: sutoto255@yahoo.co.id

Naskah Masuk : 28 November 2022

Naskah Revisi : 12 Desember 2022

Naskah Diterima : 21 Desember 2022

Abstract

Based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, there are 254.17 hectares of protected paddy fields that are allocated for other land uses in the Spatial Plans of Pekalongan City. The implication will hamper the process of space utilization. This article is intended to identify the leading sectors. The development of leading sectors is the basis for policies to utilize protected paddy fields for other land uses in Pekalongan City. The method used is Klassen Typology analysis, Location Quotient analysis and Shift-Share analysis. The results of the analysis show that the trade and services sector is one of the leading sectors. Trade and services are one of the urban activities that utilize the protected paddy fields.

Keywords: *Protected paddy fields, spatial plans, land use, leading sectors*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah melalui proses perubahan cukup panjang sejak tahun 2016 dan memenuhi ketentuan yang mengaturnya maka perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 telah ditetapkan pada akhir tahun 2020 yang lalu. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020. RTRW Kota Pekalongan hasil perubahan tersebut, mengalokasikan kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) hektar. Alokasi tersebut tersebar di berbagai kawasan, pada empat atau seluruh kecamatan di Kota Pekalongan.

Selanjutnya, pada awal tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan kebijakan baru terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD). Kebijakan tersebut adalah Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Berdasarkan keputusan tersebut, alokasi LSD di Kota Pekalongan seluas 775,17 hektar.

Terdapat perbedaan luasan alokasi kawasan pertanian pada RTRW Kota Pekalongan dengan LSD berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN yang cukup signifikan, yaitu seluas 254,17 hektar. Artinya, terdapat lahan seluas 254,17 hektar yang seharusnya dialokasikan sebagai LSD di Kota Pekalongan, tetapi ditetapkan untuk rencana pola ruang yang lain pada RTRW Kota Pekalongan.

Penetapan sebagian LSD di Kota Pekalongan untuk rencana pola ruang yang lain, tidak mendapatkan permasalahan atau penolakan dari instansi/kementerian terkait, ketika proses penyusunan dan penetapan RTRW Kota Pekalongan yang lalu. Keputusan tentang LSD berimplikasi membawa mundur proses pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan, karena seharusnya sudah dialokasikan rencana pola ruang yang lain, ternyata ditetapkan sebagai LSD.

Perubahan atau perbedaan luasan tersebut berimplikasi terhadap permasalahan dalam proses pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Padahal, proses permohonan perizinan pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan terus

berjalan cepat dalam rangka pengembangan kegiatan perkotaan atau pemanfaatan ruang, terutama untuk kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri, serta perumahan dan kawasan permukiman.

Perubahan atau perbedaan luasan 254,17 hektar tersebut, harus dicarikan solusi atau urgensi kebijakannya oleh Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga dapat segera diakomodasi oleh Kementerian ATR/BPN. Jika telah diakomodasi Kementerian ATR/BPN maka proses pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan dapat berjalan sesuai dengan RTRW Kota Pekalongan dan berkembangnya kegiatan perkotaan sehingga dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan Kota Pekalongan.

Perubahan atau perbedaan kawasan pertanian dan LSD tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan sektor unggulan Kota Pekalongan. Perubahan atau perbedaan tersebut, sesuai RTRW Kota Pekalongan, salah satunya dialokasikan untuk memperluas atau mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa (**selanjutnya disingkat KPJ**). Selama ini, sektor/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (**selanjutnya disingkat PBERMSM**) merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan setiap tahunnya sehingga dipacu perkembangannya, selanjutnya diharapkan dapat memacu perkembangan sektor-sektor lainnya serta berdampak bagi pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kota Pekalongan. Identifikasi sektor unggulan ini, membantu menyediakan urgensi kebijakan terhadap kebutuhan pemanfaatan LSD bagi alokasi rencana pola ruang yang lain pada RTRW Kota Pekalongan. Diharapkan, urgensi kebijakan yang kuat terhadap kebutuhan perubahan atau perbedaan luasan LSD di Kota Pekalongan tersebut, dapat mendorong segera dikeluarkan persetujuan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga proses pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan dapat berjalan sebagaimana RTRW Kota Pekalongan (hasil perubahan).

1.2. Sektor Unggulan

Mendasarkan pada ketentuan pokok tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014), penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tentunya dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan atau potensi yang dimilikinya dan peluang atau kesempatan yang ada. Semua daerah melakukan hal yang sama tersebut, sehingga seluruh daerah seakan berlomba meningkatkan daya saingnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti yang telah disampaikan oleh Richardson pada tahun 1973 bahwa faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ialah besarnya permintaan barang/jasa dari daerah lain. Semakin besar jumlah permintaan dari luar daerah maka akan berdampak semakin besar pertumbuhan ekonominya (Pratama, 2020). Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika permintaan dari luar daerah meningkat maka proses produksi yang dilaksanakan akan semakin meningkat, sehingga pemanfaatan sumber daya daerah, terutama bahan baku dan tenaga kerja (*man power*), akan semakin meningkat. Implikasinya akan meningkatkan kekayaan atau kepemilikan daerah dan kesempatan kerja. Pendekatan ini menegaskan pemahaman bahwa suatu daerah memiliki sektor unggulan jika mampu mengungguli persaingan pada produk atau sektor yang sama dengan daerah lainnya (Suyatno, 2007).

Kondisi tersebut di atas, selaras dengan pendapat yang dinyatakan oleh Adisasmita (Adisasmita, 2005) bahwa kegiatan sektor basis memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor yang relatif berdikari atau mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah sendiri maupun mampu melakukan ekspor barang dan jasa ke daerah lain disebut sebagai sektor basis. Oleh karena itu, daerah akan semakin maju pertumbuhan ekonominya, jika semakin besar ekspornya ke daerah lainnya. Selanjutnya, disampaikan bahwa setiap perubahan atau pergeseran pada

sektor basis akan berimplikasi terhadap efek pengganda perekonomian suatu daerah.

Suatu pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah didasarkan atas jumlah peningkatan ekspor dari daerah tersebut ke daerah lainnya disebut sebagai teori ekonomi basis (*economic base theory*). Teori ini membagi aktivitas ekonomi menjadi sektor nonbasis dan sektor basis. Sektor basis sebagai faktor penentu atau pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Tarigan, 2005).

Teori basis digunakan dalam artikel ini disebabkan salah satu indikator kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pertumbuhan ekonomi (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Di samping itu, teori basis lebih mudah diterapkan karena analisisnya yang lebih sederhana serta ketersediaan data yang dibutuhkan.

Mendasarkan kepada beberapa pandangan atau teori tersebut, sektor unggulan, yang juga merupakan sektor basis, sangat dibutuhkan suatu daerah, agar perekonomian daerah dapat tumbuh dan berkembang, sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai visi pembangunannya, Kota Pekalongan berupaya secara terus menerus, memanfaatkan kekuatan dan potensinya untuk mendorong perkembangan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan tersebut, salah satunya adalah dengan mengalokasikan KPJ, kawasan peruntukan industri, dan kawasan perumahan di dalam rencana pola ruang RTRW Kota Pekalongan.

1.3. Gambaran Singkat Daerah dan Kondisi Perekonomian

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 46,42 km² dan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 307.150 jiwa. Wilayah Kota Pekalongan adalah kawasan pesisir pada Pulau Jawa bagian utara, topografi dan morfologi wilayahnya berada pada ketinggian 0 s.d. 6 meter dari permukaan laut, sangat datar dan beberapa lokasi telah diidentifikasi berada pada ketinggian di bawah permukaan laut. Dari dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, didapatkan data bahwa luasan kawasan genangan banjir dan rob tahun 2020

mencapai 1.730 hektar atau 37,37% dari luas wilayah. Sebagian besar kawasan tersebut terletak di wilayah utara Kota Pekalongan. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman di kawasan genangan tersebut mulai ditinggalkan penghuninya. Bahkan terdapat kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk negatif. Selain itu, tantangan berat pembangunan yang harus dihadapi adalah *land subsidence* atau penurunan permukaan tanah.

Posisi strategisnya Kota Pekalongan karena terletak pada pertengahan poros jalan Jakarta dan Surabaya. Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah (Prov. Jateng), Kota Pekalongan juga merupakan salah satu PKW di Prov. Jateng dan merupakan zona inti dari kawasan perkotaan Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan), yang merupakan salah satu kawasan strategis di Prov. Jateng. Implikasinya adalah berkembang menjadi salah satu pusat pelayanan di jalur regional Pantai Utara Jawa. Terbukti, selama ini, sektor/pangan usaha PBERMSM serta sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan (**selanjutnya disingkat IP**) merupakan lapangan usaha yang menyumbang kontribusi terbesar pada PDRB.

Kebijakan pengembangan wilayah selama ini belum berhasil secara optimal. Kondisi ini dapat diidentifikasi berdasarkan indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, masih berfluktuasi. Misalkan indikator pertumbuhan ekonomi yang belum menunjukkan kecenderungan semakin membaik maupun indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan yang masih berfluktuasi, belum menunjukkan kecenderungan menurun yang optimal (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021, 2021).

Di sisi lain, terjadinya pandemi Covid-19 maka berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2020 mengalami kontraksi yaitu dengan angka pertumbuhan -1,87% serta beberapa indikator kinerja makro juga menunjukkan kemunduran. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya percepatan

pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satunya melalui kebijakan pengembangan sektor unggulan.

Gambaran perekonomian daerah dan Prov. Jateng didasarkan atas data PDRB Tahun 2016-2020. Data tersebut diuraikan pada Tabel 1 s.d. Tabel 6. Tabel 1 dan Tabel 2 menguraikan PDRB Kota Pekalongan dan Prov. Jateng Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Dapat diidentifikasi, PDRB Kota Pekalongan dan Prov. Jateng mengalami kecenderungan yang meningkat selama periode tersebut, kecuali akibat dampak pandemi Covid-19 maka mengalami kontraksi pada tahun 2020, sehingga nilai total PDRB mengalami penurunan.

Tabel 3 dan Tabel 4 menjelaskan distribusi atau kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan dan Prov. Jateng Tahun 2016-2020. Dapat diketahui bahwa meskipun sektor/lapangan usaha IP sama-sama memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB

Kota Pekalongan dan Prov. Jateng, tetapi kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan pertambangan di Kota Pekalongan relatif sangat kecil kontribusinya dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini merupakan hal yang wajar karena Kota Pekalongan merupakan kawasan perkotaan sehingga pada umumnya kontribusi lapangan usaha tersebut relatif kecil. Pada umumnya, sumbangan sektor/lapangan usaha di kawasan perkotaan adalah sektor sekunder atau tersier.

Tabel 5 dan Tabel 6 menguraikan tentang pertumbuhan sektor atau lapangan usaha dan pertumbuhan agregat PDRB Kota Pekalongan dan Prov. Jateng Tahun 2016-2020. Berdasarkan kedua tabel tersebut, diidentifikasi bahwa dampak pandemi mengakibatkan tahun 2020 terjadi kontraksi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan dan Prov. Jateng negatif. Pada beberapa sektor atau lapangan usaha juga menunjukkan pertumbuhan yang negatif.

Tabel 1 PDRB Kota Pekalongan (ADHK 2010) Tahun 2016-2020

(dalam Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	323.59	308.06	317.40	332.08	353.19
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	1,356.60	1,415.64	1,478.74	1,550.36	1,542.95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.43	13.05	13.74	14.25	14.21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.63	8.07	8.49	8.85	9.46
F	Konstruksi	880.17	928.65	980.58	1,026.77	1,015.54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,407.43	1,487.77	1,570.07	1,655.88	1,578.46
H	Transportasi dan Pergudangan	432.15	457.38	489.71	526.56	397.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.24	332.86	325.42	376.25	362.02
J	Informasi dan Komunikasi	316.37	354.15	391.08	432.42	506.78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.88	403.52	424.19	440.13	444.23
L	Real Estat	183.99	194.74	206.36	217.95	217.78
M, N	Jasa Perusahaan	23.78	25.64	27.68	29.98	28.68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278.58	289.02	300.55	312.03	308.90
P	Jasa Pendidikan	254.40	271.76	292.39	300.08	298.40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.73	82.67	89.22	96.22	104.25
R, S, T, U	Jasa lainnya	123.31	133.29	145.31	157.62	155.74
Produk Domestik Regional Bruto		6,367.27	6,706.28	7,060.92	7,477.43	7,337.83

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2 PDRB Provinsi Jawa Tengah (ADHK 2010) Tahun 2016-2020

(dalam Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116,331.12	118,450.17	121,554.48	123,195.69	126,256.48
B	Pertambangan dan Penggalian	19,367.60	20,356.48	20,855.98	21,557.11	21,385.27
C	Industri Pengolahan	295,960.84	308,770.22	322,143.29	338,820.38	326,165.24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	928.11	976.55	1,028.92	1,085.27	1,104.73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	589.80	628.21	658.88	687.51	703.22
F	Konstruksi	86,589.00	92,762.02	98,393.74	103,262.32	99,380.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	121,970.81	129,133.51	136,581.24	144,729.67	139,226.50
H	Transportasi dan Pergudangan	28,097.07	29,867.33	32,121.01	34,848.12	23,295.96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,633.47	28,350.13	30,660.79	33,442.26	30,773.75
J	Informasi dan Komunikasi	35,742.55	40,485.50	45,500.91	50,789.28	58,739.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,533.41	24,749.92	25,635.54	26,535.01	27,072.39
L	Real Estat	15,831.48	16,856.96	17,797.50	18,782.40	18,730.35
M, N	Jasa Perusahaan	3,032.33	3,296.66	3,609.30	3,989.82	3,702.92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,720.44	23,304.54	24,137.86	25,033.50	24,705.57
P	Jasa Pendidikan	31,479.47	33,674.59	36,286.32	39,040.75	38,948.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,929.50	7,525.67	8,187.91	8,738.37	9,454.46
R, S, T, U	Jasa lainnya	13,362.35	14,561.84	15,937.47	17,375.66	15,984.26
Produk Domestik Regional Bruto		849,099.35	893,750.30	941,091.14	991,913.12	965,629.09

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

Tabel 3 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T ,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,13	14,39	14,06	13,53	14,30
B	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,55	2,55	2,48	2,45
C	Industri Pengolahan	34,69	34,58	34,41	34,44	34,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,29	10,48	10,73	10,81	10,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,48	13,58	13,64	13,74	13,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,11	3,12	3,22	2,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,09	3,11	3,20	2,99
J	Informasi dan Komunikasi	3,04	3,34	3,47	3,64	4,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	2,98	2,96	2,89	2,98

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
L	Real Estat	1,67	1,69	1,69	1,68	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,40	0,42	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,87	2,82	2,73	2,68	2,70
P	Jasa Pendidikan	4,27	4,41	4,49	4,58	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,88	0,89	0,90	1,01
R,S,T ,U	Jasa lainnya	1,52	1,56	1,59	1,63	1,53
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

**Tabel 5 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota
Pekalongan Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	-4,80	3,03	4,63	6,36
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
F	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
L	Real Estat	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08
M,N	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	3,75	3,99	3,82	-1,00
P	Jasa Pendidikan	7,49	6,82	7,59	2,63	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021

Tabel 6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Persen)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,82	2,62	1,35	2,48
B	Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,80
C	Industri Pengolahan	4,10	4,33	4,33	5,18	-3,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,34	2,29
F	Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,97	-3,80
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,30	7,55	8,49	-33,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,07	-7,98
J	Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,51	2,03
L	Real Estat	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28
M,N	Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,31
P	Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,60	8,80	6,72	8,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01
	Produk Domestik Regional Bruto	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

2. METODE PENELITIAN

Kajian terhadap sektor unggulan telah sering dilakukan di daerah lain. Sapriadi dan Hasbiullah meneliti di Kabupaten Bulukumba yaitu terkait sektor unggulan, dengan menggunakan analisis *LQ* dan *shift-share* pada tahun 2015 (Sapriadi & Hasbiullah, 2015). Tuandali, Engka dan Wauran meneliti di Kabupaten Halmahera Utara tentang pergeseran ekonomi dan sektor unggulan, dengan menggunakan metode *LQ* dan *shift-share* pada tahun 2017 (Ferderika et al., 2017). Pada tahun 2017 juga, Basuki dan Mujiraharjo dengan menggunakan metode *location quotient* dan *shift-share*, mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Sleman (Basuki & Mujiraharjo, 2017).

Dalam artikel ini, untuk mengidentifikasi sektor unggulan, dengan menganalisis menggunakan Tipologi Klassen. Selanjutnya, dilakukan analisis *Location Quotient (LQ)*. Bagian terakhir adalah dengan metode *Shift-Share*. Tipologi Klassen dimanfaatkan guna mengidentifikasi posisi setiap sektor atau lapangan usaha perekonomian Kota Pekalongan terhadap perekonomian Prov. Jateng. Tipologi Klassen ini menghasilkan empat posisi terhadap setiap sektor di Kota Pekalongan. Empat posisi tersebut, meliputi: 1) Kuadran 1 ialah sektor maju dan cepat tumbuh; 2) Kuadran 2 ialah sektor maju tetapi tertekan; 3) Kuadran 3 ialah sektor potensial dan masih dapat berkembang; serta 4) Kuadran 4 ialah sektor tertinggal dan tumbuh lambat.

Tabel 7 Matriks Tipologi Klasen

		Kontribusi thd PDRB	
		$y_1 \leq y$	$y_1 \geq y$
Laju Pertumbuhan PDRB	$r_1 \geq r$	Kuadran 3	Kuadran 1
	$r_1 \leq r$	Kuadran 4	Kuadran 2

Sumber: Sjafrisal dalam (Mamahit et al, 2017)

Untuk menentukan sektor di suatu daerah merupakan sektor basis atau tidak, maka digunakan analisis *LQ*. Analisis ini juga untuk mengetahui suatu daerah menjadi *net importer* atau *net ekporter* pada setiap sektor atau lapangan usaha. Analisis ini juga membantu menyusun indikator untuk menentukan apakah suatu sektor atau lapangan usaha merupakan sektor unggulan atau tidak. Cara penghitungan analisis *LQ* yaitu dengan membandingkan kontribusi suatu sektor atau lapangan usaha di suatu daerah dibandingkan peran sektor atau lapangan usaha sejenis pada daerah lebih luas. Rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{q_1/q}{Q_1/Q} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- LQ : Nilai/koeffisien LQ
- q₁ : Nilai PDRB lapangan usaha i Kota Pekalongan
- q : Nilai PDRB total Kota Pekalongan
- Q₁ : Nilai PDRB lapangan usaha i Prov. Jateng
- Q : Nilai total PDRB Prov. Jateng

Shift-share adalah analisis untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian daerah dibandingkan daerah di atasnya. Analisis ini akan mengetahui pertumbuhan suatu sektor atau lapangan usaha di daerah, dibandingkan dengan pertumbuhan sektor atau lapangan usaha sejenis pada daerah di atasnya. *Shift-share* meliputi tiga komponen yang dianalisis yaitu pertumbuhan nasional atau *national growth effect*, pengaruh bauran industri atau *industrial mix share*, serta pergeseran diferensial atau *differential shift*. *National growth effect* adalah analisis untuk menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah di atasnya terhadap perekonomian suatu

daerah (di bawahnya). *Industry mix share* adalah analisis untuk membuktikan adanya perubahan relatif kinerja sektor atau lapangan usaha di suatu daerah terhadap sektor atau lapangan usaha sejenis di daerah atasnya. *Differential Shift* adalah analisis untuk menunjukkan gambaran untuk menentukan berapa jauh daya saing industri daerah dibandingkan dengan perekonomian pada daerah di atasnya. Penghitungan *Shift-share* dengan rumus:

$$G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- G_{ij} : *Shift-share*
- N_{ij} : *Pertumbuh an nasional*
- P_{ij} : *Industrial Mix Share*
- D_{ij} : *Differential Shift*

Perhitungan pertumbuhan nasional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$N_{in,t} = E_{ir,t} \left(\frac{E_{n,t}}{E_{n,t-1}} - 1 \right) \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- N_{in,t} : *Pertumbuh an nasional*
- E_{ir,t} : PDRB lapangan usaha i Kota Pekalongan tahun awal
- E_{n,t} : PDRB Prov. Jateng tahun akhir
- E_{n,t-1} : PDRB Prov. Jateng tahun awal

Perhitungan *industrial mix share* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{Sir,t} = E_{ir,t-1} \left(\frac{E_{in,t}}{E_{in,t-1}} - \frac{E_{n,t}}{E_{n,t-1}} \right) \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- P_{Sir,t} : *Industrial Mix Share*
- E_{ir,t-1} : PDRB lapangan usaha i Kota Pekalongan tahun awal
- E_{in,t} : PDRB lapangan usaha i Prov. Jateng tahun akhir
- E_{in,t-1} : PDRB lapangan usaha i Prov. Jateng tahun awal
- E_{n,t} : PDRB Prov. Jateng tahun akhir
- E_{n,t-1} : PDRB Prov. Jateng tahun awal

Perhitungan *Differential Shift* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$D_{Sir,t} = E_{ir,t-1} \left(\frac{E_{ir,t}}{E_{ir,t-1}} - \frac{E_{in,t}}{E_{in,t-1}} \right) \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

DSir,t : *Differential Shift atau Local Share*

Eir,t-1 : PDRB lapangan usaha i Kota Pekalongan tahun awal

Eir,t : PDRB lapangan usaha i Kota Pekalongan tahun akhir

Ein,t-1 : PDRB lapangan usaha i Prov. Jateng tahun awal

Ein,t : PDRB lapangan usaha i Prov. Jateng tahun akhir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Tipologi Klassen

Hasil yang didapat, terhadap seluruh sektor atau lapangan usaha, ditampilkan secara lengkap pada matriks sebagai berikut:

Tabel 8
Tipologi Klassen Lapangan Usaha PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

<p style="text-align: center;">Kuadran 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ▪ Industri Pengolahan 	<p style="text-align: center;">Kuadran 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ▪ Konstruksi ▪ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ▪ Transportasi dan Pergudangan ▪ Informasi dan Komunikasi ▪ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ▪ Jasa lainnya
<p style="text-align: center;">Kuadran 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertambangan dan Penggalan 	<p style="text-align: center;">Kuadran 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Listrik dan Gas ▪ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ▪ Jasa Keuangan dan Asuransi ▪ Real Estat ▪ Jasa Perusahaan ▪ Jasa Pendidikan ▪ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Analisis tersebut mengidentifikasi bahwa sektor/lapangan usaha maju dan tumbuh cepat (Kuadran 1) meliputi 7 (tujuh) lapangan usaha, yaitu: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; PBERMSM; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa lainnya. Sektor/lapangan usaha maju tetapi tertekan (Kuadran 2) terdapat 7 (tujuh), yaitu: Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor/lapangan usaha potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran 3) meliputi 2 (dua) lapangan usaha ialah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta IP. Terdapat sektor yang tertinggal dan tumbuh lambat ialah sektor/lapangan usaha pertambangan dan penggalan. Pertambangan dan penggalan adalah sektor yang tidak ada atau tidak berkembang di wilayah Kota Pekalongan.

3.2. Analisis Location Quotient

Penghitungan yang dilakukan maka didapatkan nilai LQ seluruh sektor atau lapangan usaha tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Location Quotient Lapangan Usaha PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.37	0.35	0.35	0.36	0.37	0.36
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	0.61	0.61	0.61	0.61	0.62	0.61
Pengadaan Listrik dan Gas	1.79	1.78	1.78	1.74	1.69	1.76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.72	1.71	1.72	1.71	1.77	1.73
Konstruksi	1.36	1.33	1.33	1.32	1.34	1.34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.54	1.54	1.53	1.52	1.49	1.52
Transportasi dan Pergudangan	2.05	2.04	2.03	2.00	2.24	2.07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.57	1.56	1.41	1.49	1.55	1.52
Informasi dan Komunikasi	1.18	1.17	1.15	1.13	1.14	1.15
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.13	2.17	2.21	2.20	2.16	2.17
Real Estat	1.55	1.54	1.55	1.54	1.53	1.54
Jasa Perusahaan	1.05	1.04	1.02	1.00	1.02	1.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.64	1.65	1.66	1.65	1.65	1.65
Jasa Pendidikan	1.08	1.08	1.07	1.02	1.01	1.05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.48	1.46	1.45	1.46	1.45	1.46
Jasa lainnya	1.23	1.22	1.22	1.20	1.28	1.23

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa hanya terdapat 3 (tiga) sektor atau lapangan usaha yang memiliki nilai di bawah 1, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta IP. Lapangan usaha lainnya memiliki nilai > 1 artinya merupakan sektor basis. Terdapat dua lapangan usaha yang memiliki nilai > 2 yaitu Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Temuan data hasil perhitungan yang menarik ialah sektor atau lapangan usaha IP di Kota Pekalongan memiliki sumbangan yang relatif besar bagi PDRB Kota Pekalongan dan memiliki angka pertumbuhan relatif sama dengan lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB Prov. Jateng tetapi memiliki nilai $LQ < 1$. Padahal, sektor atau lapangan usaha IP di Kota Pekalongan didominasi oleh IKM batik maupun TPT (tekstil dan produk tekstil). Produk-produk tersebut sebagian besar merupakan produk yang dikirim atau dimanfaatkan luar daerah, termasuk juga dikirim untuk ekspor.

3.3. Analisis *Shift-Share*

Berdasarkan Analisis *Shift-Share* yang dilakukan maka didapatkan nilai *shift-share* serta komponen *shift-share* yaitu pertumbuhan nasional, *industrial mix share*, dan *differential shift*. Nilai hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Perhitungan Pertumbuhan Nasional

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Nasional (Rp M)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	74.34
Pertambangan dan Penggalian	0.00

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Nasional (Rp M)
Industri Pengolahan	311.66
Pengadaan Listrik dan Gas	2.86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.75
Konstruksi	202.21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323.33
Transportasi dan Pergudangan	99.28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.19
Informasi dan Komunikasi	72.68
Jasa Keuangan dan Asuransi	86.35
Real Estat	42.27
Jasa Perusahaan	5.46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	64.00
Jasa Pendidikan	58.44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.63
Jasa lainnya	28.33
	1,462.77

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pertumbuhan nasional menggambarkan bagaimana peranan Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Tabel 10 menemukan fakta bahwa perekonomian Kota Pekalongan dalam posisi baik karena bernilai positif. Nilai tersebut juga mengindikasikan besarnya pengaruh faktor eksternal terhadap perekonomian Kota Pekalongan.

Tabel 11
Hasil Perhitungan Industrial Mix Share

Lapangan Usaha	Industrial Mix Share (Rp M)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-46.73
Pertambangan dan Penggalian	0.00
Industri Pengolahan	-173.21
Pengadaan Listrik dan Gas	-0.49

Lapangan Usaha	Industrial Mix Share (Rp M)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.29
Konstruksi	-72.18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-124.22
Transportasi dan Pergudangan	-173.12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-23.34
Informasi dan Komunikasi	130.87
Jasa Keuangan dan Asuransi	-29.83
Real Estat	-8.58
Jasa Perusahaan	-0.20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-39.66
Jasa Pendidikan	1.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.33
Jasa lainnya	-4.13
	-552.86

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Industrial Mix Share adalah komponen yang menandakan perubahan relatif kinerja suatu sektor atau lapangan usaha di Kota Pekalongan terhadap sektor atau lapangan usaha yang sama di Prov. Jateng. Dapat dipahami juga, sebagai pertumbuhan nilai tambah bruto sektor atau lapangan usaha i dibandingkan total PDRB Prov. Jateng. Tabel 11 menunjukkan sebagian besar bernilai negatif menunjukkan penurunan nilai tambah bruto lapangan usaha Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 12
Hasil Perhitungan Differential Shift

Lapangan Usaha	Differential Shift (Rp M)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.00
Pertambangan dan Penggalian	0.00
Industri Pengolahan	47.90
Pengadaan Listrik dan Gas	-0.59
Pengadaan Air, Pengelolaan	0.37

Lapangan Usaha	Differential Shift (Rp M)
Sampah, Limbah dan Daur Ulang	
Konstruksi	5.34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-28.08
Transportasi dan Pergudangan	38.92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1.07
Informasi dan Komunikasi	-13.15
Jasa Keuangan dan Asuransi	11.83
Real Estat	0.10
Jasa Perusahaan	-0.35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.99
Jasa Pendidikan	-16.35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.44
Jasa lainnya	8.23
	60.65

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Differential Shift merupakan unsur untuk menunjukkan beda pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dan nilai tambah bruto sektor atau lapangan usaha sejenis Prov. Jateng. Komponen ini juga menunjukkan daya saing atau keunggulan lapangan usaha yang sama PDRB Kota Pekalongan dan Prov. Jateng. Pada Tabel 12 memiliki nilai lapangan usaha dan nilai total yang positif menunjukkan daya saing Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing komponen tersebut maka dijumlahkan masing-masing lapangan usaha sehingga didapatkan total *Shift-Share*, yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Total Shift-Share

Lapangan Usaha	Total Shift-Share
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.60
Pertambangan dan Penggalian	0.00
Industri Pengolahan	186.35

Lapangan Usaha	Total Shift-Share
Pengadaan Listrik dan Gas	1.78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.83
Konstruksi	135.37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	171.04
Transportasi dan Pergudangan	-34.92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.78
Informasi dan Komunikasi	190.41
Jasa Keuangan dan Asuransi	68.35
Real Estat	33.79
Jasa Perusahaan	4.91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.33
Jasa Pendidikan	44.00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.52
Jasa lainnya	32.43
Total	970.56

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Apabila nilai komponen pertumbuhan nasional dan *differential shift* positif maka sektor atau lapangan usaha tersebut memiliki posisi yang baik. Lapangan usaha yang mempunyai *differential shift* positif, berarti memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sektor atau lapangan usaha yang sama di daerah lain. Sektor atau lapangan usaha tersebut berarti juga telah terkonsentrasi di Kota Pekalongan dan memiliki perkembangan relatif lebih cepat terhadap daerah lainnya. Tabel 13 menunjukkan nilai sektor atau lapangan usaha maupun total, yang bernilai positif menunjukkan, lapangan usaha tersebut progresif. Hanya satu lapangan usaha yang tidak progresif yaitu Transportasi dan Pergudangan.

Dari tiga analisis yang dilakukan maka dapat diringkas menjadi sebuah matriks sebagai berikut:

Tabel 14 Ringkasan Hasil Seluruh Analisis

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen	LQ	Total Shift-Share	Kesimpulan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kuadran 3	< 1	(+)	
Pertambangan dan Penggalian	Kuadran 4	0	0	
Industri Pengolahan	Kuadran 3	< 1	(+)	
Pengadaan Listrik dan Gas	Kuadran 2	> 1	(+)	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Kuadran 1	> 1	(+)	Sektor Unggulan
Konstruksi	Kuadran 1	> 1	(+)	Sektor Unggulan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Kuadran 1	> 1	(+)	Sektor Unggulan
Transportasi dan Pergudangan	Kuadran 1	> 1	(-)	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kuadran 2	> 1	(+)	
Informasi dan Komunikasi	Kuadran 1	> 1	(+)	Sektor Unggulan
Jasa Keuangan dan Asuransi	Kuadran 2	> 1	(+)	
Real Estat	Kuadran 2	> 1	(+)	
Jasa Perusahaan	Kuadran 2	> 1	(+)	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Kuadran 1	> 1	(+)	Sektor Unggulan
Jasa Pendidikan	Kuadran 2	> 1	(+)	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Kuadran 2	> 1	(+)	
Jasa lainnya	Kuadran 1	> 1	(+)	Sektor Unggulan

Sumber: Hasil Kompilasi, 2022

3.4. Hasil

Berdasarkan tiga analisis yang telah dilakukan di atas, dapat diidentifikasi setiap sektor atau lapangan usaha PDRB atau perekonomian Kota Pekalongan pada antara 2016-2020, meliputi:

- 1) Terdapat 6 (enam) sektor/lapangan usaha yang merupakan sektor unggulan, yaitu yang menempati kuadran 1 pada analisis Tipologi Klassen, memiliki nilai LQ > 1 dan memiliki total *shift-share* bernilai (+). Keenam sektor/lapangan usaha tersebut ialah: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; PBERMSM; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Lainnya.
- 2) Sektor/lapangan usaha yang lain, berpotensi dikembangkan menuju sektor unggulan, yaitu beberapa sektor/lapangan usaha yang memiliki nilai LQ > 1 dan total *shift-share* bernilai (+), tetapi memiliki posisi Tipologi Klassen di Kuadran 2 atau 3. Sektor/ lapangan usaha tersebut berpotensi untuk didorong pengembangannya menjadi sektor unggulan.
- 3) IP adalah sektor/lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap PDRB tetapi memiliki posisi yang belum cukup baik.
- 4) Pertambangan dan Penggalian adalah sektor lapangan usaha dengan posisi paling terbelakang karena berada pada kuadran 4, nilai LQ nol dan total *shift-share* nol, karena Kota Pekalongan tidak terdapat

potensi pertambangan dan penggalian sama sekali, sehingga nilai PDRB lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian bernilai nol.

3.5. Pembahasan

- 1) Berdasarkan analisis yang dilakukan, sektor/lapangan usaha PBERMSM merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Pekalongan. Di samping itu, PBERMSM berkontribusi terbesar bagi PDRB Kota Pekalongan, selama lebih dari satu dekade ini, bersama sektor/lapangan usaha IP. Masing-masing memiliki kontribusi lebih 20% terhadap PDRB Kota Pekalongan setiap tahunnya.
- 2) Sektor/lapangan usaha PBERMSM dikembangkan atau berlokasi pada rencana pola ruang KPJ pada RTRW. Sesuai RTRW, KPJ adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 mengalokasikan kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 hektar. Alokasi kawasan perdagangan dan jasa, sebagian besar berada pada koridor jalan, sebagai urat nadi perekonomian Kota Pekalongan. Di samping itu, koridor-koridor tersebut juga merupakan kawasan strategis kota (KSK), berdasarkan urgensi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, alokasi kawasan perdagangan dan jasa pada RTRW Kota Pekalongan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.
- 3) Dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, diperoleh data lapangan pekerjaan (Tabel 15). Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar angkatan kerja Kota Pekalongan tahun 2020 yang bekerja, terkonsentrasi pada sektor/lapangan usaha IP sebanyak 52.989 orang (36,24%) serta Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebanyak 49.810 orang (34,07%). Sangat logis bahwa Kota Pekalongan mengalokasikan rencana pola ruang KPJ untuk mendorong

pengembangan sektor atau lapangan usaha PBERMSM, karena 34,07% tenaga kerja bekerja pada sektor tersebut, sehingga mendorong perkembangan sektor/lapangan usaha tersebut, akan berimplikasi terhadap peningkatan masyarakat semakin banyak.

Tabel 15 Lapangan Pekerjaan Angkatan Kerja yang Bekerja Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Pekerjaan Utama	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	3.822
2	Industri Pengolahan	52.989
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	49.810
4	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	25.086
5	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	
6	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	
7	Pertambangan dan Penggalian	14.512
8	Listrik, Gas dan Air	
9	Bangunan	
Jumlah		146.219

Sumber: Diperinaker, 2022

- 4) Todaro (2000) berpendapat bahwa seluruh negara berupaya agar pertumbuhan ekonominya selalu meningkat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonominya. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi juga sebagai solusi berbagai permasalahan sosial ekonomi negara, seperti penanggulangan kemiskinan, menekan disparitas pendapatan, serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang terus-menerus kesempatan kerja dan kesempatan berusaha meningkat, sehingga akan berimplikasi untuk menekan pengangguran dan kemiskinan masyarakat (Sumarsono, 2009).
- 5) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan target pertumbuhan ekonomi yang baik, serta TPT dan angka kemiskinan yang menurun

optimal maka dibutuhkan alokasi pengembangan KPJ pada sebagian LSD. Kecenderungan perubahan lahan pertanian atau LSD merupakan kecenderungan yang terjadi di wilayah perkotaan. Studi yang dilakukan di Kota Depok, menunjukkan bahwa pertumbuhan perkotaan berimplikasi terhadap lahan produktif atau lahan pertanian (Alinda FM Zain, Galuh Syahban, 2013).

- 6) Sebagian lahan pertanian atau LSD di Kota Pekalongan terletak di kawasan terbangun sehingga produktivitasnya menurun, akibat tidak berfungsi maksimalnya saluran irigasi. Sebagian lahan pertanian dan LSD yang lain pun terkena dampak rob sehingga memiliki produktivitas rendah (Marfai et al., 2017). Kondisi ini juga menjadi dasar kebijakan pemanfaatan LSD bagi penggunaan lahan lainnya di Kota Pekalongan.
- 7) Sektor atau lapangan usaha IP, meskipun bukan merupakan sektor unggulan, berdasarkan analisis yang dilakukan, tetapi berkontribusi cukup besar (di atas 20%) bagi PDRB Kota Pekalongan selama puluhan tahun ini. Sektor/lapangan usaha IP pun juga menyerap jumlah tenaga kerja yang tertinggi di Kota Pekalongan yaitu 52.989 orang (36,24%). Oleh karena itu, sangat beralasan juga, Pemerintah Kota Pekalongan mendorong pengembangan sektor ini karena juga merupakan penggerak utama (*prime mover*) perekonomian Kota Pekalongan.
- 8) Sektor atau lapangan usaha IP didominasi oleh IKM Batik. Saat ini tercatat 1.882 unit IKM batik, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 11.263 orang. Potensi IKM batik dan dampaknya bagi perekonomian dan masyarakat tersebut, menjadi alasan logis sektor atau lapangan usaha IP tetap dikembangkan.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Sektor/lapangan usaha PBERMSM merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Pekalongan. PBERMSM juga memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota

Pekalongan selama lebih dari satu dekade ini yaitu lebih dari 20% setiap tahunnya. Tenaga kerja yang terlibat dalam PBERMSM juga sangat besar, mencapai 49.810 orang (34,07%).

Pengembangan sektor/lapangan usaha PBERMSM dengan mengalokasikan rencana pola ruang KPJ pada RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dengan mengubah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi sangat logis atau beralasan. Pengembangan sektor/lapangan usaha PBERMSM dapat menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian Kota Pekalongan.

Sektor/lapangan usaha IP berperan penting, meskipun berdasarkan analisis, bukan unggulan. Hal ini karena komoditi hasil sektor atau lapangan usaha IP Kota Pekalongan, berbeda dengan umumnya daerah lain, yaitu batik. IP juga sangat penting karena menyerap tenaga kerja terbesar. Menjadi sangat logis jika Kota Pekalongan tetap mengembangkan sektor atau lapangan usaha IP, khususnya IKM batik, dengan mengalokasikan pada sebagian kecil LSD Kota Pekalongan.

4.2. Rekomendasi

- 1) Sektor atau lapangan usaha PBERMSM sangat strategis bagi Kota Pekalongan, sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan wilayah, peningkatan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini adalah rekomendasi agar dijadikan urgensi kebijakan terhadap kebutuhan pengembangan KPJ dengan memanfaatkan sebagian LSD.
- 2) Komoditi yang dihasilkan sektor atau lapangan usaha IP terutama adalah batik. Meskipun hasil perhitungan berbagai alat analisis membuktikan bukan sektor unggulan, namun yang dijadikan urgensi kebijakan pengembangan IP adalah peran IP, khususnya IKM batik, yang signifikan bagi perekonomian wilayah.
- 3) Dengan semakin berkurangnya kawasan pertanian atau LSD, Pemerintah Kota Pekalongan harus terus meningkatkan kerja sama dengan daerah lain, terutama terkait dengan keamanan penyediaan bahan pangan di Kota Pekalongan.

5. REFERENSI

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu.
- Alinda FM Zain, Galuh Syahban, M. E. (2013). *Analisis Perubahan Peruntukan Lahan Pertanian Perkotaan (Urban Agriculture) Menjadi Non Pertanian di Kota Depok* (Issue September).
- Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 15(1), 52–60. <https://doi.org/10.4103/2276-7096.188531>
- Ferderika, D., Tuandali, N., Engka, D. S. M., Wauran, P. C., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2017). Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Dan Sektor Unggulan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2010-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 87–99.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." 288, 288.
- Mamahit, E. . ., Pangemanan, P. A., & Ngangi, C. R. (2017). Analisis Sektor Unggulan Dan Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Agri-Sosioekonomi*, 13(3A), 75. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3a.2017.18027>
- Marfai, M. A., Mardiatno, D., Cahyad, A., & Nucifera, F. (2017). Pemodelan Spasial Bahaya Banjir Rob Berdasarkan Skenario. *Bumi Lestari*, 13(2), 244–256.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021, Pub. L. No. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021, 571 (2021).
- Pratama, M. P. (2020). Analisis dan Kontribusi Sektor Basis Non-Basis: Penentu Potensi Produk Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 75–82. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.313>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pub. L. No. 23 Tahun 2014, 460 (2014).
- Sapriadi, & Hasbiullah. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), 71–86. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/1155/1121>
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*.
- Suyatno, S. (2007). Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapiimplementasi Uu No. 22/1999 Dan Uu No. 5/1999. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* (Vol. 1, Issue 2, p. 144). <https://doi.org/10.23917/jep.v1i2.3899>
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara.